

Jurnal Ilmiah

Sosial Humaniora

(Social Humanities Scientific Journal)

Universitas Darma Persada

Volume 1 Agustus 2023

PENGUNAAN KATA GANTI ORANG PERTAMA "WATASHI" PADA
KALIMAT PERKENALAN PEMBELAJAR BAHASA JEPANG

Juariah, Hari Setiawan, Riri Hendriati

PENGERAK EKONOMI DI PREFEKTUR NON INDUSTRI KOCHI,
JEPANG

Yosefa Putri Tanjungsari, Herlina Sunarti, Rima Novitasari, Alpina Pamugari

KONSTRUKSI PASIF BAHASA JEPANG DALAM WACANA
EKSPLANASI

Andi Irma Sarjani

ANALISA PENGARUH KOMUNIKASI DAN KERJASAMA ANTAR
KARYAWAN TERHADAP KINERJA DAN OPTIMALISASI PRODUKSI

Endang Tripujiastuti, Sukardi, Erwin, Herlina Sunarti

PENGEMBANGAN KAWASAN TERPADU EKONOMI MANDIRI
(BANGSANTRI) YANG DIINTEGRASIKAN DENGAN SDGs DESA

Agus Salim Dasuki

RELEVANSI MATAKULIAH KEMAHIRAN BERBAHASA JEPANG
TERHADAP KEMAMPUAN KELULUSAN JLPT MAHASISWA PRODI
BAHASA JEPANG D3

Hargo Saptaji, Hermasnyah Djaya

MARKETING DAN BUDAYA DALAM PERILAKU KONSUMEN DI
INDONESIA

Widiastuti, Febi Nurhiduri, Eka Yuniar Ernawati, Yessy Harun

Lembaga Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat dan Kemitraan
Universitas Darma Persada
Jakarta



JURNAL ILMIAH SOSIAL HUMANIORA
UNIVERSITAS DARMA PERSADA

Pelindung	: DR. Tri Mardjoko, SE, MA
Penanggungjawab	: DR.Eng. Fauzry Fahmi, M.Eng.
Pimpinan Redaksi	: Sukardi SE, MM
Chief Editor	: DR. Dian A. Rahim, SE, MM
Section Editor	: 1. DR. Derry Wanta, SE, M.Si. 2. DR. Fridolini, M.Hum.
Layout Editing	: 1. Yusran Hanif, S.Sos. 2. Susilo Handoyo, SE
Mitra Bestari	: 1. DR. Atik Isniawati, SE.Ak, M.Si. 2. Ari Artadi, SS, MA. Ph.D, 3. Prof. DR. Albertine Minderop, MA. 4. DR. C. Dewi Hartati, M.Si. 5. DR. Sri Ari Wahyuningsih, MM
Alamat Redaksi	: Jl. Taman Malaka Selatan, Pondok Kelapa Jakarta Timur (13450)

Kata Pengantar

Puji Syukur kami panjatkan pada Alloh Tuhan Maha Kuasa akhirnya kami dapat mewujudkan niat kami dengan menerbitkan Jurnal Ilmiah untuk bidang Sosial dan Humaniora. Hal ini sebagai wadah bagi penulis yang terdiri dari dosen tetap khususnya dan tidak menutup kemungkinan dari dosen tidak tetap dan dosen diluar Unsada umumnya, dalam turut serta dalam mengembangkan aspirasi dan ide-ide cemerlang melalui tulisan-tulisannya sebagai salah satu pengaktualisasikan tridarma perguruan tinggi.

Tentu kami hanyalah manusia, segala pertimbangan koreksi dan masukan yang positif sangat kami butuhkan dari pembaca sekalian untuk perbaikan kedepan.

Akhirnya selamat membaca dan kami tunggu partisipasi Bapak/Ibu sekalian untuk turut serta mewarnai tulisan-tulisan dalam Jurnal ini.

Jakarta, Juli 2023

Dewan Redaksi

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
PENGUNAAN KATA GANTI ORANG PERTAMA "WATASHI" PADA KALIMAT PERKENALAN PEMBELAJAR BAHASA JEPANG	1 - 8
<i>Juariah, Hari Setiawan, Riri Hendriati</i>	
PENGERAK EKONOMI DI PREFEKTUR NON INDUSTRI KOCHI, JEPANG.....	9 - 18
<i>Yosefa Tanjung Sari, Herlina Sunarti, Rima Novitasari, Alpina Pamugari</i>	
KONSTRUKSI PASIF BAHASA JEPANG DALAM WACANA EKSPLANASI.....	19 - 28
<i>Andri Irma Sarjani</i>	
ANALISA PENGARUH KOMUNIKASI DAN KERJASAMA ANTAR KARYAWAN TERHADAP PRODUKSI	29 - 39
<i>Endang Tripujiastuti, Sukardi, Erwin, Herlina Sunarti</i>	
PENGEMBANGAN KAWASAN TERPADU EKONOMI MANDIRI (BANGSANTRI) YANG DIINTEGRASIKAN DENGAN SDGs DESA.....	40 – 62
<i>Agus Salim Dasuki</i>	
RELEVANSI MATAKULIAH KEMAHIRAN BERBAHASA JEPANG TERHADAP KEMAMPUAN KELULUSAN JLPT MAHASISWA PRODI BAHASA JEPANG D3.....	63 - 74
<i>Hargo Saptaji, Hermansyah Djaya</i>	
MARKETING DAN BUDAYA DALAM PERILAKU KONSUMEN DI INDONESIA.....	75 - 81
<i>Widiastuti, Febi Nurhiduri, Eka Yuniar Ernawati, Yessy Harun</i>	

PENGEMBANGAN KAWASAN TERPADU EKONOMI MANDIRI (BANGSANTRI) YANG DIINTEGRASIKAN DENGAN SDGs DESA

Agus Salim Dasuki
Mahasiswa Program Doktor Jurusan Manajemen Pendidikan
Universitas Pakuan Bogor
Email: agussalimdasuki@gmail.com

Abstrak:

Isu utama pembangunan wilayah nasional¹ saat ini adalah masih besarnya kesenjangan antar wilayah, khususnya kesenjangan pembangunan antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Sehubungan dengan hal tersebut, arah kebijakan utama pembangunan wilayah nasional difokuskan untuk mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah. Oleh karena itu, diperlukan arah pengembangan wilayah yang dapat mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI, yaitu Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua, dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di Wilayah Jawa-Bali dan Sumatera.

Dimensi kewilayahan. Strategi kebijakan pembangunan berdimensi kewilayahan (*strategic development regions*) dilakukan dengan mendorong percepatan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, sebagai penggerak utama pertumbuhan (*engine of growth*), di masing-masing pulau, terutama di wilayah koridor ekonomi, dengan menggali potensi dan keunggulan daerah. Upaya tersebut didorong juga dengan kebijakan industrialisasi pengolahan bahan mentah, agar dapat meningkatkan nilai tambah serta menciptakan kesempatan kerja baru, dan optimalisasi investasi Pemerintah, BUMN/BUMD, dan Swasta pada klaster-klaster industri untuk memicu dampak penggandanya (*multiplier effect*) pada daerah sekitarnya, termasuk di wilayah-wilayah tertinggal. Upaya peningkatan pembangunan ekonomi di semua pusat pertumbuhan tersebut, harus tetap mengacu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Di sisi lain, untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi investor, dilakukan upaya peningkatan dan penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah termasuk kejelasan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, serta peningkatan kapasitas aparatur, kelembagaan, dan keuangan pemerintah daerah.

Untuk menghindari timbulnya kesenjangan baru antarwilayah koridor ekonomi dengan wilayah sekitarnya di setiap pulau, dilakukan juga upaya peningkatan pemberdayaan ekonomi lokal, penciptaan akses transportasi lokal ke wilayah pertumbuhan, dan percepatan pemenuhan infrastruktur dasar pada daerah tertinggal, termasuk desa tertinggal. Pada saat yang bersamaan dilakukan upaya percepatan peningkatan pembangunan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kota layak huni yang aman dan nyaman; hijau yang berketahanan iklim dan bencana; cerdas; dan mempunyai daya saing kota. Di samping itu, *untuk mewujudkan kemandirian masyarakat dan menciptakan desa-desa mandiri dan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi, serta penguatan keterkaitan kegiatan ekonomi kota-desa, dilakukan juga peningkatan pembangunan kawasan perdesaan.*

Dalam pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut, Pemerintah secara berkelanjutan perlu berupaya untuk meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi kebijakan antar Kementerian/Lembaga dan antara Kementerian/Lembaga dengan Pemerintah Daerah sehingga pelaksanaan **pembangunan wilayah** dalam pembangunan nasional dapat mencapai tujuan utama yaitu keseimbangan antarwilayah dan pemerataan kualitas kehidupan masyarakat.

¹ Wilayah nasional adalah seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi berdasarkan peraturan perundang-undangan (PP No. 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional)

I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang kewenangan pemerintahannya tersebar baik secara vertikal maupun horizontal. Pembagian kewenangan secara vertikal, menjadikan pemerintahan tidak hanya berhenti pada pemerintah daerah saja tetapi juga terdapat pemerintahan desa yang berada dalam pembinaan pemerintah kabupaten. Sementara itu, terdapat fenomena masyarakat pedesaan lebih tertinggal dibandingkan masyarakat perkotaan. Perhatian terhadap kehidupan di desa yang pada akhirnya melahirkan kebijakan pembangunan pemberdayaan. Kebijakan tersebut berimplikasi pada bantuan keuangan dan pengelolaannya. Namun pada tataran implementasinya tidak terlepas dari berbagai permasalahan meskipun pada saat yang sama pemerintah desa dituntut untuk mengelola dana desa secara efektif dan akuntabel. Perhatian Pemerintah Daerah kepada Desa melalui pemerintah kecamatan dapat didekati dengan mengacu pada pendapat Stoner (2006) yang mengatakan bahwa pengelolaan adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan terhadap upaya anggota masyarakat, organisasi dan pengguna sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan. Kemudian strategi peningkatan peran kecamatan dilakukan melalui perencanaan; penganggaran; pencairan dana untuk penyusunan laporan pertanggungjawaban; dan pendampingan.

Makalah ini membahas tentang model pengembangan program kebijakan pemberian dana desa di kementerian daerah tertinggal.

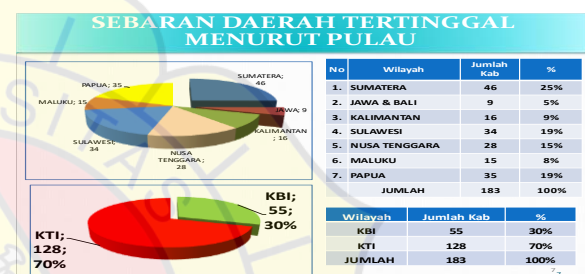
II. Latar Belakang

Dalam perspektif pemerataan, proses pembangunan yang telah dilaksanakan masih menyisakan permasalahan yang berkaitan dengan ketimpangan *antara wilayah perdesaan dan perkotaan*.

Ketertinggalan kawasan perdesaan dicirikan oleh keterisolasian, kemiskinan, pendapatan

rendah, standar hidup (*standards of living*) rendah, fasilitas pelayanan umum atau infrastruktur sangat terbatas, penambahan penduduk tinggi, dan perkembangan ekonomi sangat lambat.

Oleh sebab itu diperlukan *pendekatan pembangunan perdesaan yang terintegrasi dari aspek ekonomi, infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat*. Pendekatan pembangunan perdesaan tersebut dinamakan Program BEDAH DESA.



Data Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal tahun 2014

TAHAPAN SASARAN RPJMN DALAM RPJPN 2005-2025

- Dalam RPJM 3 (2015-2019), sasaran RPJMN nya adalah Memantapkan pem-bangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif Perekonomian Daerah yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan iptek. Dimana penguatan daya saing daerah adalah daya saing berbasis faktor input meliputi: Sumber Daya Alam: Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Pertambangan.

- Pariwisata: Wisata Alam, Wisata Seni dan Budaya, Wisata Kuliner

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL (1dan2) RPJMN 2015-2019, Arah Kebijakan :

Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Dasar Publik, Pengembangan Perekonomian Masyarakat Yang Didukung Oleh Sumber Daya Manusia (SDM) Yang Berkualitas Dan Infrastruktur Penunjang Konektivitas Antara Daerah Tertinggal Dan Kawasan Strategis.(Dokumen RPJMN BAPPENAS).

- ✓ Mengembangkan perekonomian masyarakat di daerah tertinggal dalam rangka meningkatkan nilai tambah sesuai dengan karakteristik, posisi strategis, dan keterkaitan antarkawasan yang meliputi aspek infrastruktur, manajemen usaha, akses permodalan, inovasi, dan pemasaran;
- ✓ Meningkatkan aksesibilitas yang menghubungkan daerah tertinggal dengan pusat pertumbuhan melalui pembangunan sarana dan prasarana transportasi, seperti: peningkatan akses jalan, jembatan, pelabuhan, serta pelayanan penerbangan perintis dan pelayaran perintis;
- ✓ Meningkatkan kualitas SDM, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), dan kapasitas tata kelola kelembagaan pemerintahan daerah tertinggal, meliputi aspek peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan daerah, kelembagaan, dan keuangan daerah;
- ✓ Mempercepat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk pelayanan dasar publik di daerah tertinggal, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, transportasi, air bersih, energi/listrik,

telekomunikasi, perumahan dan permukiman;

- ✓ Memberikan tunjangan khusus kepada tenaga kesehatan, pendidikan, dan penyuluh pertanian;
- ✓ Melakukan penguatan regulasi terhadap daerah tertinggal dan pemberian insentif kepada pihak swasta dalam pengembangan iklim usaha di daerah tertinggal;
- ✓ Melakukan pembinaan terhadap daerah **tertinggal yang sudah terentaskan melalui penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah dan peningkatan kapasitas SDM**
- ✓ *Mendukung pengembangan kawasan perdesaan dan transmigrasi sebagai upaya pengurangan kesenjangan antarwilayah. Dalam proses pembangunan kedepan, diharapkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan baru dapat mendukung upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal dan pengembangan kawasan perdesaan, disamping perlu dukungan semua sektor terkait*
- ✓ *Meningkatkan koordinasi dan peran serta lintas sektor dalam upaya mendukung pembangunan daerah tertinggal melalui pengembangan kawasan perdesaan dan transmigrasi sebagai program pembangunan lintas sektor;*

- ✓ Mempercepat pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat, yang difokuskan pada:
 - (i) pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal,
 - (ii) peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan terutama di wilayah terisolir,
 - (iii) pembangunan infrastruktur transportasi untuk membuka keterisolasian,
 - (iv) pemihakan terhadap Orang Asli Papua,
 - (v) penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah,
 - (vi) pembangunan sentra logistik untuk mengatasi kemahalan,
 - (vii) pengembangan energi baru dan terbarukan terutama di wilayah terisolir,
 - (viii) penguatan kelembagaan percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat

RANCANGAN RPJMN 2015-2019
STRATEGI PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL...(2):

- (a) Penguatan koordinasi lintas sektor (mengurangi ego sektor) melalui penyusunan regulasi dan penyusunan instrumen untuk dapat mengarahkan KL dalam mengintervensi daerah tertinggal (misal : roadmap/rencana aksi pembangunan daerah tertinggal)
- (b) Penyempurnaan peraturan-peraturan yang kurang harmonis dengan pembangunan daerah tertinggal, misalnya UU Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah, UU Jalan, UU Sumber Daya Air dll.
- (c) Pemenuhan kebutuhan pelayanan publik dasar sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM);
- (d) pengembangan kegiatan produksi yang menghasilkan produk yang cepat dapat diperdagangkan berbasis komoditi unggulan Kabupaten;

- (e) Penyediaan sarana prasarana penunjang pengembangan ekonomi lokal;
- (f) Pemberian insentif bagi pelaku usaha guna meningkatkan iklim investasi dan mendorong perekonomian di daerah tertinggal
- (g) Peningkatan konektivitas antar wilayah melalui penyediaan sarana dan prasarana transportasi di daerah tertinggal dan yang menghubungkan daerah tertinggal dan daerah maju sebagai pusat pemasaran;
- (h) Pembangunan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia.
 - (i) Memperbanyak pengembangan pendidikan keterampilan
 - (j) Pengembangan pendidikan aparatur untuk peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah

III. ARAH
PEMBANGUNAN
TERTINGGAL

KEBIJAKAN
DAERAH

3.1 Sasaran Pembangunan Daerah Tertinggal

Kabinet Indonesia Bersatu II menfokuskan sasaran program pada : *peningkatan kesejahteraan rakyat, penguatan demokrasi, dan penegakan keadilan.* Secara keruangan (*spatial*), ketiga sasaran tersebut merefleksikan kebijakan *pemerataan kesejahteraan rakyat antar wilayah* atau *pengurangan kesenjangan perkembangan antar wilayah*, melalui kebijakan pembangunan daerah tertinggal. Pembangunan daerah tertinggal merupakan kebijakan pemihakan (*affirmative policy*) terhadap daerah-daerah yang tingkat kemajuannya dibawah rata-rata nasional.

Sasaran hasil (*outcomes*) pembangunan daerah tertinggal (**2014**) adalah:

- (i) meningkatnya pertumbuhan ekonomi lokal dan kesejahteraan rakyat di daerah tertinggal,
- (ii) meningkatnya ketersediaan pelayanan transportasi dan telekomunikasi serta sarana dan prasarana lainnya di daerah terpencil, terluar, dan terdepan,
- (iii) terlaksananya penanganan rehabilitasi daerah pasca konflik dan bencana di daerah tertinggal,
- (iv) meningkatnya pelaksanaan pengembangan potensi daerah, dengan memanfaatkan otonomi daerah.

Dengan sasaran dampak (*impact*) berkurangnya jumlah daerah tertinggal, dengan indikator terentaskannya daerah tertinggal di sedikitnya 50 kabupaten dari 183 kabupaten tertinggal paling lambat 2014.

3.2 Strategi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

Untuk mencapai sasaran pembangunan daerah tertinggal tersebut diatas, **Visi** (*achievable dream*) pembangunan daerah tertinggal adalah: terwujudnya daerah tertinggal menjadi daerah yang wilayah dan masyarakatnya maju dalam rangka ketahanan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan **Misi** (*normative action to cope with the achievable dream*) yang akan dijalankan adalah: (i) meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, pengembangan ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat, penyediaan infrastruktur, dan pengembangan kawasan secara terpadu, (ii) meningkatkan kegiatan investasi dan pemanfaatan potensi sumberdaya wilayah, dan (iii) menguatkan kapasitas lembaga daerah (pemerintah, usaha swasta, dan masyarakat).

Untuk mewujudkan visi dan menjalankan misi tersebut diatas,

prinsip-prinsip dalam pembangunan daerah tertinggal adalah: *pemerataan, keadilan, pemihakan, pemberdayaan, dan percepatan, kemitraan, dan pembangunan berkelanjutan.*

Dalam rangka pelaksanaan visi dan misi pembangunan daerah tertinggal, Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal telah menetapkan 4 (empat) pilar **strategi percepatan pembangunan daerah tertinggal**, yaitu:

Pilar pertama, peningkatan kemampuan masyarakat dan kemandirian daerah tertinggal, yang dilakukan melalui pelaksanaan kebijakan: (1) pengembangan ekonomi lokal, (2) pemberdayaan masyarakat, (3) penyediaan infrastruktur kawasan, dan (4) penguatan kapasitas lembaga atau organisasi pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat;

Pilar kedua, optimalisasi pemanfaatan potensi sumberdaya wilayah di daerah tertinggal, yang dilakukan melalui pelaksanaan kebijakan: (1) inventarisasi potensi sumberdaya wilayah, (2) peningkatan promosi investasi dalam pemanfaatan potensi sumberdaya wilayah, (3) penguatan forum kerjasama antar daerah dalam pemanfaatan potensi sumberdaya wilayah, dan (4) pengembangan kawasan produksi di perdesaan;

Pilar ketiga, penguatan integrasi ekonomi antara daerah tertinggal dan daerah maju, yang dilakukan melalui pelaksanaan kebijakan: (1) pengembangan jaringan ekonomi antar wilayah, (2) pengembangan prasarana antar wilayah, dan (3) pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi daerah.

Pilar keempat, penanganan daerah khusus, yang dilakukan melalui pelaksanaan kebijakan: (1) penyediaan akses pelayanan transportasi dan telekomunikasi, serta sarana & prasarana lainnya ke daerah terpencil,

terluar, dan terdepan/perbatasan, (2) penanganan rehabilitasi daerah pasca konflik dan bencana, dan (3) pengembangan kawasan potensial (kota penyangga, kawasan ekonomi khusus, kawasan industri terpadu, dan kawasan perbatasan), dan (4) pembangunan kawasan perdesaan terpadu.

3.3 Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah Tertinggal

Dengan mempertimbangan kriteria 'daya ungkit' terhadap: (i) peningkatan pertumbuhan ekonomi lokal, (ii) pengurangan kemiskinan dan pengangguran, (iii) pengembangan kawasan yang memiliki permasalahan khusus, dan (iv) penguatan integrasi ekonomi antara daerah tertinggal dan maju, pilihan kebijakan prioritas pembangunan daerah tertinggal pada periode 2009-2014 adalah:

1. Peningkatan pemanfaatan potensi sumberdaya wilayah (*regional resources*), dengan rencana aksi: (1) inventarisasi potensi sumberdaya wilayah; (2) promosi investasi dalam pemanfaatan potensi sumberdaya wilayah; (3) penguatan kapasitas daerah dalam pengelolaan pemanfaatan potensi sumberdaya wilayah; dan (4) penguatan kerjasama antar daerah dalam pemanfaatan potensi sumberdaya wilayah (*regional management*).

2. Peningkatan penyediaan infrastruktur daerah (*regional infrastructure*), dengan rencana aksi: (1) penyediaan pelayanan sarana sosial dasar dan utilitas (pelayanan pendidikan, kesehatan, air bersih, listrik, telekomunikasi); (2) penyediaan prasarana dasar kawasan (jalan, embung, irigasi, pasar, dermaga, airstrip, berikut sarana transportasi); dan (3) fasilitasi pengembangan jaringan infrastruktur antar kawasan/wilayah.

3. Peningkatan perekonomian dan investasi daerah (*investment*), dengan rencana aksi: (1) pembinaan pengembangan ekonomi lokal, (2) penyusunan rencana investasi daerah, (3) peningkatan kerjasama investasi, (4) pengembangan jaringan sarana distribusi dan perdagangan antar wilayah; dan (5) pengembangan kawasan produksi.

4. Penguatan lembaga daerah (*local institution*), dengan rencana aksi: (1) penguatan kapasitas lembaga pemerintah daerah, (2) penguatan kapasitas lembaga dunia usaha dan organisasi masyarakat setempat, dan (3) peningkatan pemberdayaan masyarakat.

5. Penanganan pengembangan daerah khusus (*special area*), dengan rencana aksi: (1) pemantapan penyediaan bantuan pembangunan daerah tertinggal dan khusus (terpencil, terluar, terdepan, daerah pasca konflik dan bencana, (2) pengembangan dan pemanfaatan lahan, (3) pengembangan kawasan potensial (kota penyangga, kawasan ekonomi khusus, kawasan industri terpadu, dan perbatasan), dan (4) pembangunan kawasan perdesaan terpadu.

3.4 Instrumen Pelaksanaan Kebijakan Khusus

Untuk mengefektifkan pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah tertinggal melalui dukungan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat, dalam hal ini Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal mengembangkan instrumen pelaksanaan kebijakan khusus, yang meliputi:

1. **Penyediaan bantuan program pembangunan daerah tertinggal dan khusus**; dengan katagori kegiatan sebagai berikut: penyediaan bantuan 'block grant' untuk mendukung pengembangan ekonomi lokal,

pemberdayaan masyarakat, penyediaan infrastruktur kawasan, fasilitasi peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta penguatan kapasitas organisasi pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat (dengan sasaran lokasi pada daerah terpencil, terluar, dan terdepan, serta daerah pasca bencana/konflik);

2. **Penyediaan bantuan program pembangunan infrastruktur perdesaan;** dengan katagori kegiatan sebagai berikut: (1) penyediaan bantuan penyediaan sarana sosial dasar dan utilitas (pendidikan, kesehatan, air bersih & sanitasi, energi listrik, telekomunikasi) dan (2) penyediaan bantuan infrastruktur kawasan perdesaan (jalan desa/poros desa, embung, irigasi, pasar, terminal, airstrip, dermaga sungai/laut, berikut penyediaan alat angkutan darat/sungai/laut/udara);
3. **Penyediaan bantuan pengembangan kawasan produksi;** dengan katagori kegiatan sebagai berikut: (1) penyediaan bantuan pengembangan kawasan produksi dalam kegiatan usaha: pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, pertambangan rakyat, pariwisata, dan (2) pengembangan industri pengolahan dan pendukung, yang dikelola secara kemitraan antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
4. **Penyediaan bantuan penguatan forum kerjasama antar daerah;** dengan katagori kegiatan sebagai berikut: (1) penyediaan bantuan pengelolaan forum kerjasama antar daerah dalam pemanfaatan potensi sumberdaya wilayah, (2) fasilitasi promosi pemanfaatan potensi sumberdaya wilayah, dan (3) fasilitasi penyiapan paket investasi dalam pemanfaatan potensi sumberdaya

wilayah dan pembangunan infrastruktur antar daerah.

5. **Penyediaan bantuan pemberdayaan masyarakat;** dengan katagori kegiatan sebagai berikut: (1) fasilitasi penguatan kapasitas organisasi dunia usaha dan organisasi masyarakat, dan (2) penyediaan bantuan pemberdayaan masyarakat di perdesaan;
6. **Penyediaan bantuan program pembangunan kawasan perdesaan terpadu;** dengan katagori kegiatan sebagai berikut: (1) penyediaan bantuan manajemen untuk penguatan kapasitas pemerintah daerah dan peran dunia usaha dan perbankan; (2) penyediaan bantuan tenaga pendamping masyarakat, (3) penyediaan bantuan langsung masyarakat (BLM) untuk melaksanakan penyediaan prasarana dan sarana desa secara swakelola; dan (4) penyediaan dana penjaminan kredit usaha rakyat (KUR) untuk meningkatkan akses kredit bagi kelompok usaha masyarakat; dengan sasaran pada 'kecamatan' potensial di daerah tertinggal dengan lokus kawasan desa.

IV. TUJUAN DICANANGKANNYA PROGRAM BANGSANTRI

Dalam rangka membangun kawasan perdesaan dengan memanfaatkan potensi unggulan lokal dan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah perdesaan. Sasaran yang ingin dicapai dari pengembangan program Bangsantri ini adalah sebagai berikut:

- **Meningkatkan pendapatan masyarakat perdesaan sesuai standar MDGs.**

Pada saat dilakukan survey pendahuluan incam/capita masyarakat di perdesaan daerah tertinggal rata-rata

< dari 2 US\$/orang/hari, dengan pendekatan pembangunan perdesaan yang terintegrasi dari aspek ekonomi, infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat, diharapkan pendapatan mereka dapat meningkat hingga rata-rata > dari 2 US\$ per orang per hari.

- **Menciptakan lapangan kerja baru di wilayah perdesaan**

- Untuk itu dengan memanfaatkan komoditas unggulan lokal /kabupaten, baik sektor pertanian, perdagangan dan UMKM, maka Kementerian Daerah Tertinggal sejak tahun 2013 telah melakukan beberapa proyek percontohan di beberapa daerah tertinggal dan dilakukan melalui koordinasi lintas Kedepuitan(Deputi pengembangan Sumber daya menyiapkan Melakukan pemetaan potensi, Membuat studi tapak, Melakukan promosi dan Identifikasi Isu-isu yg harus ditangani). Deputi Pengembangan Infra struktur Menyiapkan infrastruktur dasar dan infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi lokal, melakukan KIS program dg K/L terkait, dan Deputi Pengembangan ekonomi Mencari sumber pendanaan, Menyiapkan Lembaga Keuangan Mikro, Membuat mekanisme pendanaan, Menyiapkan kelompok sasaran masyarakat

dan Menentukan target capaian. Dalam pelaksanaannya Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal menggandeng Kabupaten daerah tertinggal. Dalam Program percontohan Bangsantri tersebut, dirancang penyediaan sumber dana yang murah dengan skema pendanaan yang menarik dan mudah diakses oleh masyarakat, diharapkan masyarakat perdesaan mendapatkan pekerjaan yang layak yang merupakan lapangan kerja baru.

- **Menyediakan sarana dan prasarana perdesaan dalam rangka mendukung pengembangan komoditas unggulan lokal**

Pada umumnya hambatan yang paling besar dirasakan oleh masyarakat perdesaan adalah ketersediaan infra struktur dasar yang memadai, seperti jalan desa yang digunakan untuk mengangkut hasil produksi, fasilitas komunikasi untuk memantau harga komoditas di pasar nasional, pasar desa yang memadai dan dikelola secara profesional, jembatan desa dan angkutan perdesaan. Tidak sedikit komoditas unggulan lokal hasil produksi masyarakat yang tidak bisa terjual kepasar dan atau kadang-kadang hasil produksi masyarakat dijual jauh dibawah harga pasar. Apabila fasilitas komunikasi baik telpon maupun internet tersedia masyarakat perdesaan bisa mengetahui harga komoditas yang mereka hasilkan baik ditingkat nasional maupun internasional dapat ketahui. Sehingga mereka dapat menikmati hasil jerih payahnya dengan harga yang memadai.

- **Pembedayaan masyarakat.**

Sasaran yang diharapkan dari program Bangsantri ini bahwa masyarakat perdesaan yang daerahnya mempunyai komoditas unggulan lokal tidak menjadi penonton di daerahnya. Pernah dalam satu kesempatan kunjungan kerja ke daerah Maluku Utara penghasil rumput laut masyarakat setempat sebagian kecil menjadi buruh yang mengumpulkan rumput laut dari laut, mencuci dan menjemur rumput laut. Sementara pemilik tanamannya yang sedang panen hanya menjual harga rumput lautnya 50% dari harga pasar di tingkat kabupaten. Dalam program Bangsantri ini sebagian besar masyarakat setempat dapat berperan aktif apakah sebagai pemilik,

penggarap, pedagang dan penjual jasa transportasi. Untuk ibu-ibu yang masih dalam usia produktif dapat terlibat dalam pengelola sektor keuangan atau bisnis kuliner.

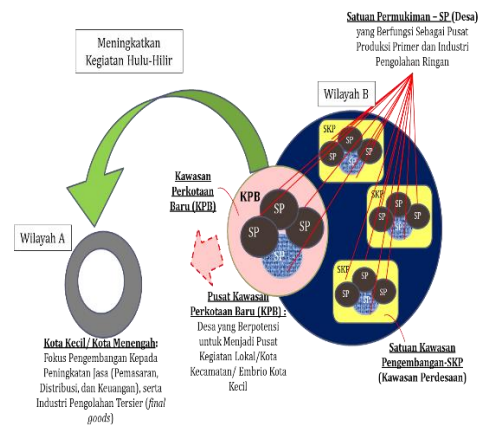
- **Penguatan kelembagaan ekonomi perdesaan:**

Hambatan utam dalam pengembangan ekonomi perdesaan adalah akses masyarakat kepada permodalan dan bunga bank yang cukup tinggi. Oleh karena itu pemerintah melalui Kementerian Pembangunan daerah tertinggal mulai tahun 2014 telah mencanangkan pemberian dana desa dan dilanjutkan dengan pendirian BUMDES sebagai lembaga pengelola keuangan di perdesaan. Diharapkan dengan adanya dana desa yang jumlahnya saat ini mencapai satu Milyar setiap desa dan langsung di transfer kedesa menjadi motivasi bagi masyarakat untuk ikut aktif dalam kegiatan ekonomi. Agar dana desa tersebut bermanfaat bagi permodalan usaha yang diharapkan menjadi penggerak ekonomi perdesaan, maka dalam pelaksanaannya dana tersebut dikelola untuk pengembangan suatu kawasan sehingga dana yang terkumpul dapat digunakan sebagai modal dalam pengembangan komoditas unggulan lokal atau produk unggulan kabupaten/PRUKAB. Agar pemanfaatan dana desa tersebut optimal, pemerintah melalui Kementerian pembangunan daerah tertinggal menyediakan tenaga pendamping di tingkat kabupaten yang bertugas membantu dalam perencanaan, pelaksanaan dan mencari akses pasar.

Menciptakan keterkaitan antara Desa dan Kota

Kesenjangan yang selama ini terjadi antara desa dan kota diharapkan dapat teratasi dengan meningkatkan kegiatan Hulu- Hilir

**GAMBAR
KETERKAITAN ANTARA DESA DAN KOTA**



Tujuan akhir dari program ini

adalah : Terciptanya penguatan ekonomi perdesaan dan tersedianya infrastruktur dasar dan infrastruktur dalam rangka mendorong peningkatan usaha produktif yang memiliki daya saing, dan mempunyai nilai tambah yang tinggi, diharapkan kondisi ini akan menjadi *prime mover* bagi kemajuan daerah tertinggal.

Output lainnya yang diharapkan dari program Bedah Desa adalah terciptanya peningkatan pendapatan masyarakat sesuai standar MDGs. Dengan bertambahnya pendapatan masyarakat desa, teredianya infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi perdesaan, diharapkan tidak ada lagi anak putus sekolah, banyaknya pengangguran dan kegiatan masyarakat semakin bergairah dan pada akhirnya tingkat kemiskinan pun semakin berkurang.

**STRATEGI IMPLEMENTASI
BANGSANTRI BERBASIS
KOMODITAS UNGGULAN
LOKAL:**

**Pengembangan Komoditas
Unggulan lokal**

- Penetapan Sektor /Komoditas Unggulan yang mempunyai nilai Komparatif dan Kompetitif Tinggi. Pemerintah Daerah harus

menentukan komoditas unggulan kabupaten/kawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan lahan, sumber daya manusia dan mempersiapkan lembaga pengelola keuangan yang tangguh.

- Pemilihan Komoditas Unggulan secara Terfokus. Dalam pemilihan komoditas unggulan lokal tersebut didasarkan pada hasil analisa ekonomi dan tersedianya opteker yang akan menerima produksi masyarakat dengan harga yang memadai.

- Pemberian Insentif bagi Pengembangan Komoditas Unggulan. Incentif tersebut berupa kemudahan akses kepada permodalan dengan kategori dana murah, tersedianya pasar lokal, dan pasar nasional melalui pengelola yang diintegrasikan dengan pengelola keuangan. Sehingga buat masyarakat ada kepastian bahwa produksi mereka akan terjual dan mendapatkan imbalan yang memadai.

Penyediaan Infrastruktur Dasar dan infrastruktur pendukung ekonomi local:

- Pembangunan Sarana Pendidikan, Kesehatan, Pemukiman dan Air Bersih
- Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi, Telekomunikasi dan Ekonomi
- Penyediaan Infrastruktur Energi

Menyiapkan Mekanisme Pendanaan yang berkelanjutan

- Menyiapkan Lembaga Keuangan Mikro dan SDM lokal
- Mencarikan Sumber dana Murah bagi masyarakat/Kelompok
- Menyiapkan Mekanisme pendanaan program
- Menyiapkan Pendampingan dalam bidang keuangan dan Administrasi.

Pengembangan SDM dan Kelembagaan Lokal

- Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara umum
- Pengembangan SDM disesuaikan dengan Potensi SDA lokal (*Link and Match*)
- Pengembangan sekolah kejuruan
- Pengembangan Balai Latihan Kerja (BLK) sesuai bakat SDM lokal

Pengembangan Kawasan Strategis

- Penetapan Kawasan Strategis dari aspek Pengembangan Pelayanan dan Jasa (*outword / inword looking*)
- Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Kawasan Strategis
- Pengembangan Kawasan melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif

Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan

Pembangunan desa dan kawasan perdesaan secara komprehensif merupakan faktor penting bagi pembangunan daerah,

kesenjangan antarwilayah. Perkembangan jumlah desa di Indonesia meningkat pesat, dari 72.944² desa pada tahun 2012 menjadi 74.093³ desa tahun 2014. Sayangnya jumlah yang selalu meningkat ini tidak diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keterisolasian wilayah karena keterbatasan akses, baik transportasi, telekomunikasi, pendidikan, kesehatan, maupun permukiman, terutama di desa-desa di kawasan perbatasan, daerah tertinggal, dan pulau-pulau kecil terluar, menjadi penyebab tingginya tingkat kemiskinan di desa.

Secara ringkas, isu-isu strategis pembangunan desa dan kawasan perdesaan yang perlu diselesaikan adalah

1. Tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat di perdesaan yang masih rendah.
2. Ketersediaan sarana dan prasarana fisik maupun non-fisik di desa dan kawasan perdesaan yang belum memadai.
3. Ketidakberdayaan masyarakat perdesaan akibat faktor ekonomi maupun non ekonomi.
4. Pelaksanaan tata kelola pemerintahan Desa yang memerlukan penyesuaian dengan amanat Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa.
5. Kualitas lingkungan hidup masyarakat desa memburuk dan sumber pangan yang terancam berkurang.
6. Pengembangan potensi ekonomi lokal desa yang belum optimal akibat kurangnya akses dan modal dalam proses produksi, pengolahan,

maupun pemasaran hasil produksi masyarakat desa.

Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Nasional (KSN) bidang ekonomi merupakan upaya untuk memacu pusat-pusat pertumbuhan dalam rangka meningkatkan nilai tambah produk komoditas unggulan yang berasal dari desa-desa, wilayah-wilayah tertinggal, dan kawasan perbatasan; serta melancarkan distribusi pemasaran baik nasional maupun global. Pusat-pusat pertumbuhan tersebut yaitu Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Kawasan Industri, dan pusat-pusat pertumbuhan penggerak ekonomi daerah pinggiran lainnya.

Dalam Pembangunan Kawasan Strategis Nasional (KSN) bidang ekonomi beberapa isu strategis yang menjadi perhatian utama, antara lain:

1. Nilai tambah potensi unggulan daerah. Minimnya permodalan dan pelatihan terkait upaya peningkatan mutu kualitas komoditas daerah maupun peningkatan kapasitas produksi unggulan di daerah.
2. Konektivitas antara pusat-pusat pertumbuhan dengan kawasan penyangga. Keterbatasan infrastruktur kawasan menyebabkan minimnya investasi industri; sulitnya masyarakat petani, nelayan, peternak, pengrajin memasarkan produknya; serta rendahnya kuantitas produk yang dihasilkan.

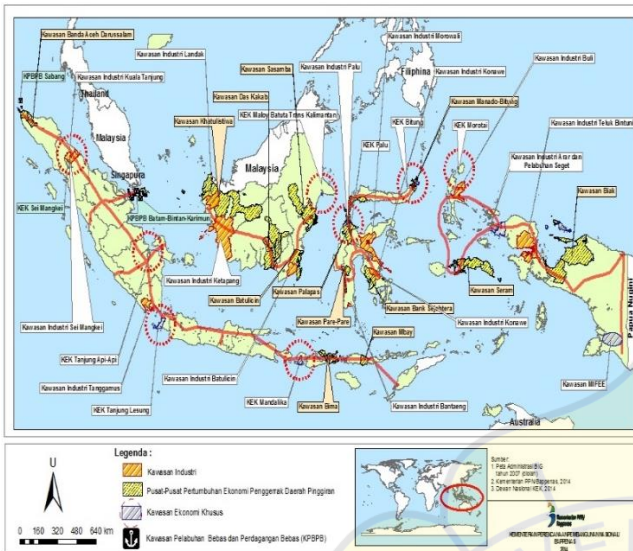
²Sumber Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia antara Menteri Dalam Negeri dengan

Ketua KPU Nomor 470/5022/SJ tanggal 6 Desember 2014

³Sumber Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Per Semester I Bulan Juni 2014

Sumber: Bappenas, 2014

GAMBAR
PETA SEBARAN KAWASAN STRATEGIS
NASIONAL BIDANG EKONOMI



Pengetahuan dan Teknologi. Sumber daya manusia pelaku usaha pertanian, nelayan, peternak, industri di kawasan strategis masih rendah kapasitasnya, lemahnya peran dan fungsi kelembagaan pengelola kawasan, kualitas tenaga kerja yang belum sesuai dengan kebutuhan kawasan, serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna yang masih belum optimal.

GAMBAR
SKETSA HIERARKI PUSAT - PUSAT
PERTUMBUHAN DAN HINTERLAND



4. *Debottlenecking* regulasi untuk peningkatan iklim investasi dan iklim usaha. Belum harmonisnya hubungan industrial secara tripartit, belum dilaksanakannya pelimpahan kewenangan pusat dan daerah kepada pengelola kawasan sebagaimana diatur oleh peraturan perundangan, serta masih terkendalanya status lahan dan hutan.

Kawasan Perbatasan

Perwujudan kawasan perbatasan negara menjadi halaman depan negara masih menghadapi kendala terutama dari dalam negeri sendiri, sedangkan dari negara tetangga merupakan tantangan yang harus kita antisipasi. Isu strategis pengembangan kawasan perbatasan negara yang dihadapi pada periode

1. **Keterisolasian kawasan perbatasan negara;**

berbasis kecamatan menjadi suatu kendala tersendiri dalam peningkatan akses infrastruktur dan pelayanan sosial dasar di kawasan perbatasan. Minimnya akses ke kawasan perbatasan juga disebabkan minimnya anggaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk pembangunan kecamatan perbatasan yang lokasinya terpencil dan terluar. Selama ini, akses infrastruktur minim sekali yang dibangun di kecamatan-kecamatan perbatasan. Keterbatasan akses infrastruktur perbatasan terutama yaitu transportasi, energi (listrik dan BBM), komunikasi dan informasi, serta minimnya pelayanan sosial dasar khususnya pendidikan

1. Belum ada sistem untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan baik industri maupun

- perdagangan berbasis potensi sumber daya kawasan perbatasan, serta menjamin pemberdayaan masyarakat perbatasan;
2. Terdapat *overlapping claim areas* segmen-segmen batas wilayah negara Indonesia dengan negara tetangga;
 3. Masih lemahnya pengamanan batas wilayah laut, darat, dan udara di kawasan perbatasan negara;
 4. pembangunan kawasan perbatasan negara dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan.

Permasalahan kawasan perbatasan negara sangat kompleks dari berbagai dimensi baik sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Kondisi ini memerlukan dukungan program lintas sektor secara terpadu. Berbagai upaya untuk menterpadukan pembangunan kawasan perbatasan negara dengan pendekatan kewilayahan masih mengalami kendala. Penetapan Lokasi Prioritas (Lokpri) kecamatan terluar perbatasan, Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan, dan penetapan pengembangan 26 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dalam PP No. 26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional belum mampu menjadi arus utama untuk mengarahkan sektor.

V. PELAKSANAAN PROGRAM BANGSANTRI

Pelaksanaan kebijakan program pengembangan kawasan terpadu dalam rangka kemandirian ekonomi (Bangsantri) di kementerian pembangunan daerah tertinggal mengacu pada kebijakan “Pengembangan Sumber daya” yang dikenal dengan “one stop service” . Kebijakan “*One Stop Service*” dari Deputy Pengembangan Sumber Daya dimaksud untuk memadukan semua kegiatan **pelayanan** lima asisten dari kedeputian Pengembangan Sumber Daya

Kementerian PDT-RI di satu *locus* tertentu, dengan harapan bahwa apa yang dilakukan sekarang bisa langsung dirasakan masyarakat lokal dan bisa menjadi *pilot project* untuk kegiatan selanjutnya..Integrasi kegiatan masing-masing kedeputian dapat dilihat pada gambar di bawah ini .



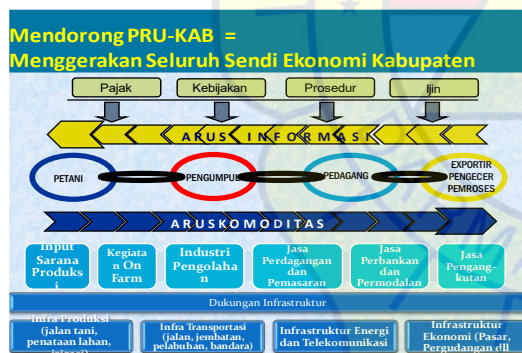
Sementara di tingkat kementerian Pembangunan daerah Tertinggal, mencanangkan PROGRAM PENGEMBANGAN DAERAH TERTINGGAL BERBASIS UNGGULAN LOKAL.

Tiap kedeputian melaksanakan kegiatan sesuai dengan Tupoksinya masing-masing dibawah koordinasi Sesmen. Sementara untuk menentukan komoditas apa yang akan dipilih sebagai komoditas unggulan, Sesmen KPDT melakukan Koordinasi dengan pemerintah daerah tingkat.II/ Kabupaten. Hasil kajian awal berupa usulan Lokasi, komoditas unggulan yang dipilih, sumber pendanaan yang diusulkan dan lembaga pengelola produk dan pengelola keuangan serta infrastruktur dasar dan infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi dikoordinasikan dengan pemerintah daerah melalui Forum Group Discussion. Salah satu contoh yang dilakukan oleh salah satu Asisten Deputy di Kementerian PDT, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel Locus-Focus Kegiatan Asdep 4/I di 18 Kab. DT Tahun 2010-2014

No.	Prov.	DT.	Kegiatan Utama PRUKAB
1.	Bengkulu	KAUR	Integrasi Biogas
2.	Jawa Barat	SUKABUMI GARUT	Handycraft Kuliner
3.	Jawa Timur	SITUBONDO	Kuliner
4.	NTB	Lombok Barat BIMA Sumbawa Barat	Integrasi Biogas Integrasi Biogas Penguatan Modal
5.	NTT	Belu Lembata Flores Timur Ende	Potensi tambang Wisata Ikan Paus Wisata Religius D. Tiga Warna
6.	KALBAR	Sabu Raijua Kapuas Hulu	Lahan Kristis Wisata D. Sentarum
7.	KALTENG	Seruyan	Prog. Unggul Sawit
8.	KALTIM	Kutai Barat	Pemb.Masy. Tambang
9.	SULTRA	Wakatobi	W. Segitiga Surga B.L.
10.	PAPUS BRT	Rajaampat	W. Terumbu Karang
111.	PAPUA	Mimika	Peng. Usaha Pertanian

Dengan dilaksanakannya strategi implementasi bedah desa berbasis komoditas unggulan lokal, diharapkan akan Menggerakkan Seluruh Sendi Ekonomi Kabupaten sebagai mana dapat dilihat dalam Gambar di bawah ini.



Pada akhirnya kondisi yang diharapkan di kawasan perdesaan akan terciptanya penguatan ekonomi perdesaan dan infrastruktur dalam rangka mendorong peningkatan usaha produktif yang memiliki daya saing, nilai tambah, dan menjadi *prime mover* bagi kemajuan daerah tertinggal.

Output lainnya yang diharapkan dari program Bangsantri/Bedah Desa berbasis produk unggulan Kabupaten adalah terciptanya peningkatan pendapatan masyarakat perdesaan sesuai standar MDGs. Dengan bertambahnya pendapatan masyarakat desa, teresediannya infrastruktur

pendukung kegiatan ekonomi perdesaan diharapkan tidak ada lagi anak putus sekolah, banyaknya pengangguran dan kegiatan masyarakat semakin bergairah dan pada akhirnya tingkat kemiskinan pun semakin berkurang.

VI. KESIMPULAN

Dalam makalah ini, penulis tidak melakukan evaluasi seberapa jauh keberhasilan program “Bangsantri” tersebut. Apakah Infra struktur dasar dan infrastruktur pendukung ekonomin di perdesaan seperti jalan desa, pasar desa, listrik desa, telekomunikasi, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan sudah sesuai dengan yang direncanakan ?. Pertanyaan berikutnya apakah Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat, fokus AMH dan LS mendekati rata-rata nasional AMH 92,91%, dan LS 7,92 Tahun (**DESA CERDAS MANDIRI**). apakah Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat DT, fokus angka AHH mendekati rata-rata nasional 69,43 Tahun dan angka kematian bayi dan ibu melahirkan sudah bisa dikategorikann **PERDESAAN SEHAT**.

- Apakah pertanyaan-pertanyaan seperti ini:
- Terpenuhiannya 70% Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk pelayanan dasar di Daerah Tertinggal (Pendidikan, Kesehatan, Air Bersih, Listrik dan Telekomunikasi);
- Meningkatkan rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal menjadi 6,5 persen pada tahun 2019;
- Berkurangnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi 12,5 persen pada tahun 2019; dan

- Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia di daerah tertinggal yang ditunjukkan oleh peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) menjadi 72,2 pada tahun 2019.

Demikian makalah yang membahas kebijakan Pemerintah tentang "Pengembangan Kawasan Perdesaan dalam rangka Kemandirian Ekonomi"(BANGSANTRI) yang dilaksanakan oleh Kementerian Pembangunan Daerah tertinggal.

Seharusnya penulis melakukan Evaluasi program kebijakan tersebut dengan menggunakan metode CIPP sebagai berikut:

Evaluasi yang baik membantu kita memahami sejauh mana program atau kebijakan tersebut berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan dan memperoleh pemahaman tentang dampaknya pada konteks yang lebih luas. Model CIPP adalah salah satu pendekatan evaluasi yang komprehensif dan dapat digunakan untuk mendapatkan wawasan yang mendalam tentang program atau kebijakan yang dievaluasi.

I. Konteks (Context) Bagian pertama dari model CIPP adalah konteks. Konteks melibatkan identifikasi masalah atau isu yang dihadapi, analisis kebutuhan, serta pemahaman tentang tujuan dan sasaran program atau kebijakan. Evaluasi konteks membantu kita memahami relevansi dan urgensi program atau kebijakan tersebut.

II. Input Komponen kedua dari model CIPP adalah input. Input melibatkan identifikasi dan analisis sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan program atau kebijakan. Evaluasi input membantu kita memahami apakah sumber daya yang diperlukan telah disediakan dengan cukup dan apakah mereka relevan untuk

mencapai tujuan program atau kebijakan.

III. Proses (Process) Proses adalah komponen ketiga dari model CIPP. Proses melibatkan implementasi program atau kebijakan yang dievaluasi. Evaluasi proses melibatkan pemantauan dan penilaian pelaksanaan program atau kebijakan tersebut. Hal ini membantu kita memahami bagaimana program atau kebijakan dijalankan, menilai efisiensi dan efektivitas pelaksanaannya, dan mengidentifikasi tantangan yang mungkin timbul.

IV. Produk (Product) Komponen terakhir dari model CIPP adalah produk. Produk melibatkan hasil atau output yang dihasilkan oleh program atau kebijakan. Evaluasi produk membantu kita mengevaluasi sejauh mana tujuan program atau kebijakan telah tercapai, dampak yang dihasilkan, dan keberlanjutan hasilnya.

Kesimpulan: Model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) adalah pendekatan yang komprehensif dalam mengembangkan program atau kebijakan. Dengan mempertimbangkan keempat komponen tersebut, evaluasi dapat memberikan pemahaman yang lebih lengkap tentang program atau kebijakan yang sedang dievaluasi. Melalui evaluasi konteks, input, proses, dan produk, kita dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan program atau kebijakan, serta rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan lebih lanjut.

Daftar Pustaka:

1. Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia; penerapan model 'bedah desa' dalam rangka

- pelaksanaan kebijakan pembangunan perdesaan di daerah tertinggal, Februari 2010
2. kebijakan strategis “one stop service” dalam pengembangan sumber daya mineral, energi dan lingkungan hidup di daerah tertinggal; DRS. AGUS SALIM DASUKI M. ENG. Deputi Pengembangan Sumber Daya Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia
 3. kebijakan kpdt bidang infrastruktur dalam mendukung penguatan kelembagaan ekonomi di daerah tertinggal; DRS. AGUS SALIM DASUKI M. ENG. Deputi Pengembangan Sumber Daya Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia
 4. Transportasi berbasis listrik”; Direktorat jenderal perhubungan darat’ ; Kementerian Perhubungan
 5. Kebijakan kpdt bidang infrastruktur dalam mendukung penguatan kelembagaan ekonomi di daerah tertinggal; DRS. AGUS SALIM DASUKI M. ENG. Deputi Pengembangan Sumber Daya Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia
 6. Increasing Access for Electricity in Disadvantage Region; Agus Salim Dasuki, Deputy Minister for Resources Development, The Ministry of Development for Disadvantaged Region
 7. The Provision of Basic Infrastructure in the Disadvantaged Region; Mr. Agus Salim Dasuki , The Deputy Minister for Infrastructure Improvement. The Ministry of Development for **Disadvantaged** Region, Presented on KPDT – ADB Workshop Empowering the Poor through Increasing Access to Energy , Jakarta, 28 April 2011
 8. Utilization Of Renewable Energy to support infrastructure improvement in disadvantage regions in Indonesia; Agus Salim Dasuki, Deputy Minister for infrastructure improvement for disadvantage regions, The Ministry of Development for Disadvantaged Regions
 9. pengembangan kawasan perdesaan terpadu dalam rangka mewujudkan kemandirian ekonomi yang didukung dengan infrastruktur dasar dan ekonomi yang memadai
- gerakan “pesan teman”; Agus Salim Dasuki .M.Eng., staf ahli menteri bidang sarana dan prasarana Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia
10. Strategi Pengembangan Kawasan Perdesaan (Studi di Kabupaten Pandeglang); Agus Lukman Hakim Program Studi Ilmu Administrasi Niaga Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, Volume 7 Nomor 1 2019 Halaman 12 – 28 Jurnal Administrasi Negara ISSN : 2598-4039 (Online) ISSN : 2302-2231 (Print) Agus Lukman Hakim Banten Email: aguslukman.hakim@stiabanten.ac.id
 11. Developing A Smart Rural Model for Rural Area Development in Indonesia, Rosita Novi Andari Puslatbang PKASN , Susy Ella Puslatbang PKASN, Puslatbang PKASN, 2019
 12. Rancang Bangun Sinergi Kebijakan Agropolitan dan Pengembangan Ekonomi Lokal Menunjang Percepatan Pembangunan Wilayah, Authors. Muhammad Iqbal Pusat analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Iwan Setiajie Anugrah Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian; 2016..08.30,
 13. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan; Kajian Implementasi Kebijakan Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat, Authors Muhammad Syafar, 2015-12-31.
 14. Implementasi Kebijakan Pengembangan Sarana Air Bersih Kawasan perdesaan Di Desa Insil Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Administrasi , 2020 - ejournal.unsrat.ac.id Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa terhadap Manajemen Keuangan Desa dalam Meningkatkan Efektivitas Program Pembangunan Desa; *Lutfhi Nur* Vol 11, No 01 (2018)